

**IPLEMENTASI REGULASI FASILITAS DARATAN PADA PELABUHAN
TOROBULU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PROPOSAL PENELITIAN

Kertas Kerja Wajib (KKW)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada
Jurusan Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau,dan
Penyeberangan



Diajukan Oleh:

Laurensius mansumber

NPT. 1704025

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III LALU LINTAS ANGKUTAN
SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN**

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD

2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di Dunia pastilah membutuhkan sarana transportasi yang bisa menghubungkan antar pulau, koneksi antar pulau ini di butuhkan dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, pastinya pada pelabuhan penyeberangan harus memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan di pelabuhan itu sendiri, tapi kenyataannya banyak pelabuhan penyeberangan di Indonesia yang belum memiliki fasilitas yang memadai sehingga dalam jalannya kegiatan pelabuhan belum terlalu efektif untuk mencapai kenyamanan bagi setiap pengguna jasa.

Keadaan fasilitas yang memadai pastilah akan meningkatkan tingkat pelayanan akan lebih baik sehingga dapat membuat pengguna jasa puas dalam menggunakan jasa sebuah moda transportasi, dengan fasilitas yang memadai akan banyak mendapatkan efek yang positif dalam memberikan pelayanan ke pengguna jasa, Adapun faktor yang dapat membuat pengguna jasa bisa puas dalam menggunakan suatu moda transportasi yaitu tersedianya fasilitas yang memadai, tertib, teratur, lancar, cepat, selamat, aman, mudah, tepat waktu dan nyaman, dengan ini pastilah dalam jalannya sistem suatu moda transportasi pasti lebih lancar, secara tak langsung bisa mempengaruhi pergerakan ekonomi di suatu wilayah, dengan berkembangnya kegiatan perekonomian yang ada di suatu wilayah pasti akan mempengaruhi kemajuan perekonomian di Indonesia juga.

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Terdiri dari 17 kabupaten dan kota. Secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 02°45' – 06°15' lintang selatan dan 120°45' – 124°30' bujur timur serta mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 km² (3.814.000 ha) dan perairan (laut) seluas 110.000km² (11.000.000 ha). Panjang garis pantai 1.740 km,

jumlah pulau 651 buah, 361 pulau diantaranya telah memiliki nama, 290 pulau belum memiliki nama dan hanya 86 pulau yang berpenghuni

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan wilayah geografis kepulauan, sehingga terdapat angkutan sungai dan danau serta angkutan penyeberangan. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau sedangkan angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya (Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010).

Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara pastinya memiliki beberapa sarana transportasi dalam menjalankan perekonomian daerah, salah satu fasilitas transportasi yang penting di kabupaten ini adalah pelabuhan Torobulu yang mana pelabuhan ini merupakan salah satu sarana dalam melakukan aktifitas perjalanan atau perpindahan yang berfungsi untuk menunjang kegiatan ekonomi serta pertumbuhan daerah.

Pelabuhan Torobulu sendiri memiliki 2 kapal yang beroperasi sehari-hari yaitu KMP Nuku dan, KMP pulau Rubiah, Guna memberikan pelayanan yang lebih baik bagi setiap pengguna jasa dan untuk mendukung kinerja pelayanan pelabuhan agar tercipta keamanan, kenyamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pengguna jasa, kendaraan dan kapal sehingga membutuhkan perbaikan hingga penambahan terhadap fasilitas daratan yang ada pada Pelabuhan Penyeberangan Torobulu.

Pelabuhan Torobulu memiliki fasilitas pokok sisi daratan, akan tetapi fasilitas tersebut belum lengkap untuk menunjang kegiatan operasional sehari-

hari. Pelabuhan Torobulu hanya memiliki fasilitas berupa gedung terminal, kantor, lapangan parkir, *gangway*, instalasi air, jembatan timbang, dan instalasi listrik. Dengan fasilitas pokok daratan yang ada, belum dapat menunjang kegiatan pelabuhan dikarenakan ada beberapa fasilitas yang kurang baik di pelabuhan ini fasilitas yang kurang baik adalah belum tersedianya fasilitas jembatan timbang yang baik, fasilitas ini memiliki fungsi untuk menimbang berat kendaraan dan muatannya yang akan disesuaikan dengan beban maksimum yang dapat di angkat oleh jembatan Movable bridge (MB), *gangway* yang merupakan sebuah jalan khusus penumpang yang berfungsi untuk memisahkan jalan masuk kapal antara kendaraan dan penumpang pejalan kaki tapi pelabuhan Torobulu belum dapat memisahkan antara pejalan kaki dan kendaraan karena keadaan *gangway* belum menyambung langsung ke dek kapal sehingga penumpang masih masuk kedalam pintu yang sama dengan kendaraan yaitu pintu rampa, luas ruang tunggu yang belum sesuai sehingga terjadi ketidaknyaman bagi penumpang dan kurangnya kursi ruang tunggu yang menyebabkan banyak penumpang yang duduk dilantai karena kursi ruang tunggu yang tidak cukup bagi penumpang dan kurang di fungsikannya lapangan parkir.

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka diambil topik dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib dengan Judul “**IMPLEMENTASI REGULASI FASILITAS DARATAN PADA PELABUHAN TOROBULU PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**”

1.2 Rumusan Permasalahan

Pada saat melakukan penelitian dan pengamatan yang dilakukan di lapangan, terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan permasalahan, antara:

1. Apakah luasan ruang tunggu di pelabuhan sudah sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan ?

2. Apakah penempatan jembatan timbang dan perencanaan *gangway* yang ada di pelabuhan Torobulu kabupaten Konawe Selatan provinsi Sulawesi Tenggara telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Tenis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan?
3. Apakah lapangan parkir siap muat dan lapangan parkir penjemput di Pelabuhan Torobulu sudah sesuai kebutuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang diharapkan dari melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui fasilitas yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu berupa ruang tunggu, *gangway*, jembatan timbang dan lapangan parkir telah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.
2. Untuk menentukan kondisi ideal fasilitas sisi darat berupa ruang tunggu, *gangway*, jembatan timbang dan lapangan parkir pelabuhan penyeberangan Torobulu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Tenis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
3. Untuk menganalisa fasilitas daratan pada pelabuhan penyeberangan Torobulu Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan pada bidang fasilitas daratan, transportasi, pembangunan dan Sistem Informasi. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar pada tingkat Perguruan Tinggi dan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan fasilitas daratan dan pembangunan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi taruna

- 1) Dapat melihat secara langsung kegiatan yang di lakukan di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu.
- 2) Meningkatkan wawasan berpikir dan pengalaman dalam pengelolaan angkutan penyeberangan.
- 3) Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi tugas akhir Kertas Kerja Wajib.
- 4) Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama mengikuti Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

- 1) Dapat memberikan masukan dibidang fasilitas daratan sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu Provinsi Sulawesi tenggara.
- 2) Menjaln kerja sama antara dinas perhubungan Provinsi Sulawesi tenggara dengan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

c. Bagi Instansi Pemerintah

Memberikan usulan dan pemecahan masalah yang ada saat ini, sehingga dapat meningkatkan pelayanan untuk pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu.

d. Bagi Masyarakat

Dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal.

1.5 Ruang lingkup penelitian

Adapun ruang lingkup penelian di batasi dalam pembahasan:

1. Lokasi di pelabuhan penyebrangan torobulu provinsi Sulawesi tenggara
2. Mengevaluasi vasilitas daratan berupa ruang tunggu, *gangway*, jembatan timbang, dan lapangan parker.

1.6 Keaslian Penelitian

NO	NAMA PENULIS	JUDUL PENELITIAN	ANALISA
1.	HELON DAMA DALAME NPT : 15 26 11	Tinjauan Fasilitas Daratan Pada Pelabuhan Penyeberangan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah	<ol style="list-style-type: none">1. Analisa Lapangan Siap Muat dan Lapangan Pengantar Penjemput2. Analisa Jalan Akses Penumpang (<i>gangway</i>)3. Analisa Jembatan Timbang dan Portal4. Analisa Pola Lalu Lintas Pelabuhan

2.	LAURENSIUS MANSUMBER NPT:1704025	Tinjauan Fasilitas Pokok Daratan Pada Pelabuhan Penyeberangan Torobulu Provinsi Sulawesi Tenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan luasan Ruang Tunggu 2. perencanaan (<i>gangway</i>) naik ke kapal 3. Penentuan penempatan Jembatan Timbang 4. Perhitungan luasan lapangan parkir
----	--	--	--

Tabel Perbedaan Keaslian

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

- a. Pada pasal 1 no 14 berbunyi, “Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.”
- b. Pada pasal 1 no. 16 berbunyi, “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.”
- c. Pada pasal 1 no. 20 berbunyi, “Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.”
- d. Pasal 1 no. 26 menjelaskan, “Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan

fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersil.”

e. Pada Pasal 70

Jenis pelabuhan terdiri atas:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. pelabuhan sungai dan danau.

f. Pada Pasal 94

Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan badan usaha pelabuhan berkewajiban :

- 1) Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan.
- 2) Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan.
- 4) Memelihara kelestarian lingkungan.
- 5) Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dan Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang, baik secara nasional maupun internasional.

2.1.2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 103 Tahun 2017 Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.

Bab II Tata Cara Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan, Pasal 2 :

- 1) Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang.
- 2) Fasilitas portal dan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sebelum loket penjualan tiket kendaraan.

- 3) Fasilitas portal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ketinggian yang disesuaikan dengan tinggi geladak kapal pada lintasan.
- 4) Setiap kendaraan beserta muatannya yang akan diangkut menggunakan kapal angkutan penyeberangan wajib diketahui:
 - a. dimensi (tinggi); dan
 - b. berat kendaraan.
- 5) Setiap kendaraan yang mengangkut barang berbahaya wajib melaporkan kepada Operator Pelabuhan.

2.1.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan:

a. Pasal 1 ayat (4) :

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal/tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

b. Pasal 1 ayat (5) :

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal/tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

c. Pasal 1 ayat (6) :

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal

tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

2.1.4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.

1. Pasal 1 ayat (4) :

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

2. Pasal 1 ayat (7) :

Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan itu sendiri adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan.

3. Pasal 1 ayat (8) :

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Organisasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan.

4. Pasal 6 ayat (5):

Rencana penentuan lahan daratan disusun untuk penyediaan kegiatan:

a. Fasilitas pokok, antara lain:

- 1) Terminal penumpang
- 2) Penimbang kendaraan bermuatan
- 3) Jalan penumpang keluar/ masuk kapal
- 4) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa
- 5) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker)
- 6) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi
- 7) Akses jalan dan/ atau kereta api
- 8) Fasilitas pemadam kebakaran
- 9) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal

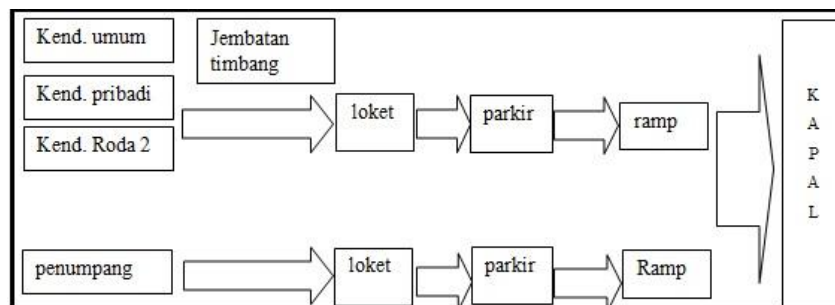
b. Fasilitas penunjang, antara lain:

- 1) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan
- 2) Tempat penampungan limbah
- 3) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan
- 4) Areal pengembangan pelabuhan Fasilitas umum.

Perhitungan kebutuhan fasilitas darat mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Darat No 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dalam lampiran ke II (dua) yang menghitung analisa fasilitas darat pelabuhan seperti ruang tunggupunumpang, ruang administrasi, dan lapangan parkir.

2.1.5 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Tenis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.

Pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Tenis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan juga menjelaskan penempatan jembatan timbang dapat dilihat pada lampiran II gambar 2 sebagai berikut :



Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Tenis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

Gambar 2.1 Denah Jembatan Timbang

2.1.6 Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK. 2681/AP. 005/DRJD/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan.

Fasilitas daratan yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 5 nomor 3 yang menyatakan bahwa :

a. Pasal 2 menyatakan bahwa :

- 1) Pelabuhan penyeberangan dipimpin oleh seorang kepala pelabuhan dan dibantu oleh petugas sesuai fungsi yang ada.
- 2) Besaran organisasi pelabuhan ditentukan berdasarkan tugas dan fungsi yang berada di pelabuhan yang bersangkutan.

b. Pasal 3 ayat b menjelaskan bahwa untuk mewujudkan perannya, maka pelabuhan penyeberangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

Fungsi perusahaan jasa kepelabuhanan :

- 1) Usaha pokok yang meliputi pelayanan terhadap penumpang, kendaraan dan muatannya serta kapal
- 2) Usaha penunjang yang meliputi kegiatan :
 - a) Penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan
 - b) Penyediaan kawasan pertokoan
 - c) Penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - d) Jasa pariwisata;
 - e) Kegiatan perawatan dan perbaikan kapal;
 - f) Penyediaan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah;
 - g) Kegiatan perhotelan,
 - h) Restoran, pariwisata,
 - i) Pos dan telekomunikasi;
 - j) Penyediaan sarana umum lainnya.

c. Pasal 4 menjelaskan bahwa

1) Untuk terwujudnya fungsi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilakukan kegiatan penataan, pengaturan dan pengawasan.

2) Kegiatan penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a) penataan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan di daratan dan di perairan;

b) penyusunan dan penataan jadwal pelayanan kapal (kedatangan dan keberangkatan);

c) penyusunan jadwal dan pembagian petugas di pelabuhan.

3) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a) koordinasi antar instansi;

b) operasional pelabuhan;

c) penanganan darurat.

4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengawasan terhadap :

a) fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangandidarat dan di perairan;

b) lapangan/operasional;

c) keamanan dan ketertiban.

d. Fasilitas daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari :

1) Fasilitas Pokok, meliputi :

a) Terminal penumpang;

b) Penimbangan kendaraan bermuatan;

c) Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gangway*);

d) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;

e) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*);

- f) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
 - g) Akses jalan dan/atau jalur kereta api;
 - h) Fasilitas pemadam kebakaran;
 - i) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.
- 2) Fasilitas Penunjang, meliputi :
- a) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhan;
 - b) Tempat penampungan limbah;
 - c) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
 - d) Areal pengembangan pelabuhan;
 - e) Fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Arti Transportasi

Menurut buku karangan Fidel Miro (2005) tentang Perencanaan Transportasi, Transportasi dapat di artikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu..

Menurut Nasution (2004), dalam bukunya yang berjudul Manajemen Transportasi mengatakan transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

2.2.2 Penimbangan Kendaraan Bermuatan

Menurut Ir. Iskandar Abubakar (2013), dalam bukunya yang berjudul Transportasi Penyeberangan, menyatakan bahwa gangway berfungsi sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan

menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambungkan pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan.

2.2.3 *Gangway*

Gangway berfungsi sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambungkan pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan¹.

2.2.4 Lapangan Parkir Siap Muat

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.SK.2681/AP.005/DRJD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Pasal 6 ayat (1) point i, lapangan parkir merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik ke kapal atau menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu giliran untuk *boarding* ke dalam kapal.

2.2.5 Fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*)

Fungsi fasilitas bahan bakar (*bunker*) menurut Ir. Iskandar Abubakar (2013) adalah sebagai tempat untuk menyimpan dan menyediakan bahan bakar kapal.

2.2.6 Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal (lapangan parkir)

Lapangan parkir merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik ke kapal atau menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu giliran untuk *boarding* ke dalam kapal

2.2.7 Instalasi air, listrik, dan telekomunikasi

Fasilitas instalasi pada pelabuhan penyeberangan antara lain sebagai berikut :

- a. Instalasi air untuk menyediakan air bersih yang digunakan untuk keperluan kapal.

- b. Instalasi listrik untuk memasok tenaga listrik guna mendukung kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
- c. Telekomunikasi untuk memudahkan komunikasi internal dan eksternal pelabuhan.

2.2.8 Fungsi utama dari terminal

Sistem transportasi, fungsi utama dari terminal adalah menyediakan fasilitas untuk masuk dan keluarnya orang/barang yang akan diangkut menuju dan meninggalkan sistem transportasi. Secara umum fungsi terminal adalah sebagai berikut :

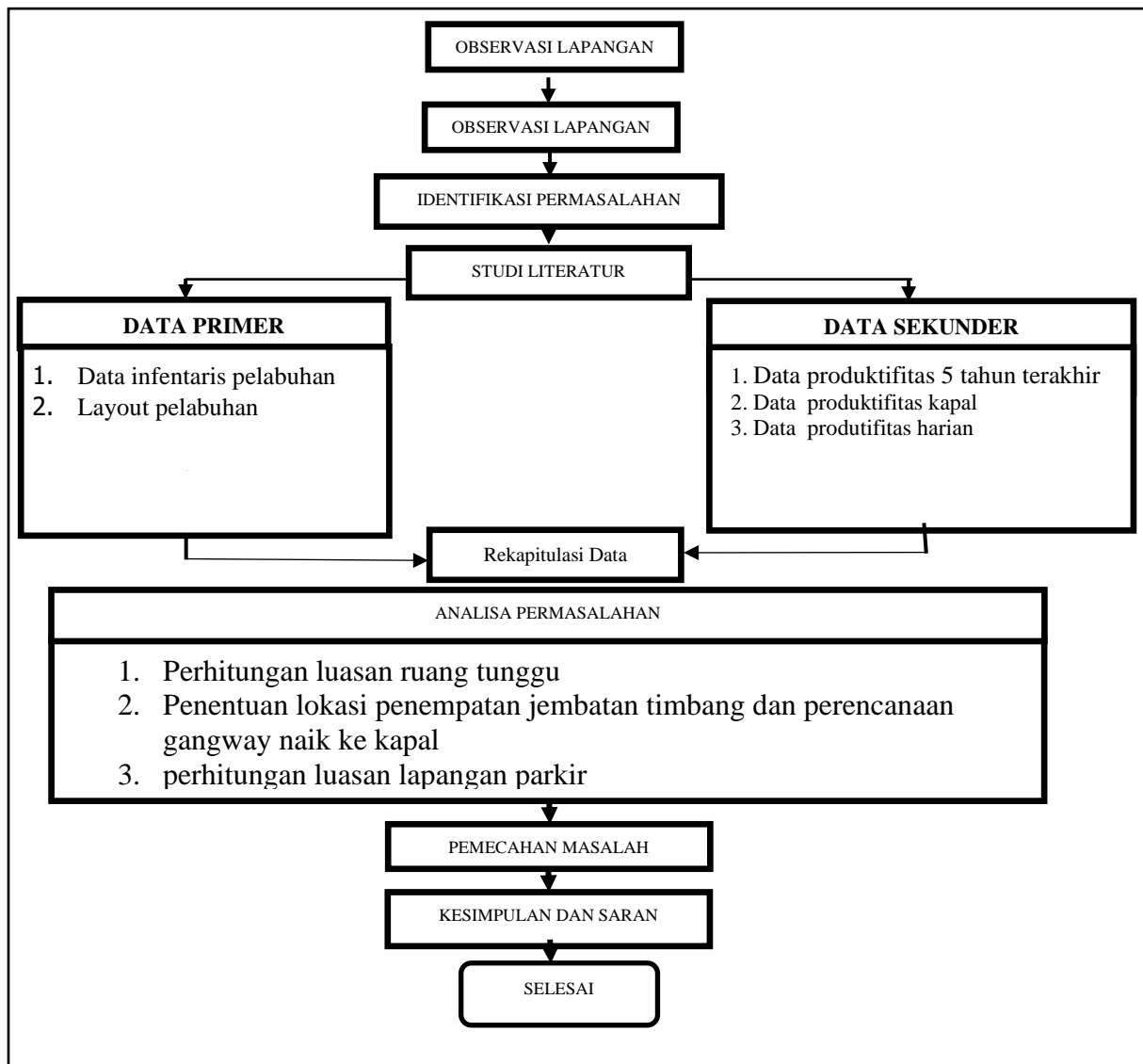
- a. memuat dan membongkar barang dan penumpang
- b. menyediakan fasilitas menunggu sementara penumpang dan barang dari waktu kedatangan hingga waktu keberangkatan. Termasuk pengepakan barang dan fasilitas kenyamanan penumpang (kedai makan dll).
- c. Dokumen pencatatan pergerakan, termasuk penghitungan penumpang, pembagian barang, pemilihan trayek, penjualan tiket, pengecekan pemesanan dan sebagainya.
- d. Tempat menunggu sementara, pemeliharaan singkat serta persiapan pemberangkatan dari kendaraan-kendaraan angkut.

Tempat penumpang dan barang mengumpul dan berkelompok, dalam ukuran yang ekonomis untuk suatu perjalanan serta sebagai tempat menyebar penumpang yang datang atau mengakhiri perjalanan

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Alur Pikir

Proses penulisan dan penelitian KKW ini menggunakan proses alur pikir sesuai dengan bagan di bawah ini :



Gambar 3.1 Bagan Alur pikir

Adapun penjelasan dari tahap alir peimikiran dari tahap mulai sampai tahap pemecahan masalah:

1. Tahap Mulai

Tahap ini merupakan tahap yang paling awal dalam melakukan penelitian,

2. Observasi Lapangan

Pada tahap ini merupakan salah satu tahap awal dari suatu penelitian karena observasi lapangan merupakan tahap untuk mengenal sebuah objek penelitian dengan mengenal objek penelitian kita akan tahu apa yang terjadi di lapangan secara *real* dan mempermudah dalam melakukan identifikasi masalah.

3. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini merupakan tahap dalam kita mengidentifikasi masalah yang kita dapat dari observasi lapangan, ketidaksesuaian antara kondisi yang seharusnya dan kondisi eksisting yang telah kita dapatkan pada tahap observasi lapangan, ketidaksesuaian yang kita dapat berdasarkan dasar hukum dan teori-teori yang berlaku sesuai dengan objek penelitian yang kita akan teliti, setelah kita mendapatkan ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dan kondisi sebenarnya dilapangan maka dilanjutkan dalam langkah rencana dalam pengumpulan data yang bisa mendukung dalam hasil analisa nanti.

4. Studi Literatur

Dalam tahapan ini merupakan mencari referensi-referensi yang dibutuhkan dalam tahapan penelitian, referensi-referensi ini merupakan dasar yang kita jadikan pendukung penelitian, referensi-referensi ini dapat berupa kajian yang sesuai dan beberapa peraturan yang masih berlaku.

5. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini merupakan tahap mengumpulkan seluruh data yang digunakan dalam penelitian pada penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer.

Data primer yaitu data-data yang didapatkan dengan cara melakukan survey secara langsung ke lapangan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapatkan dengan cara meminta data ke instansi yang bersangkutan.

6. Tahap Analisa Data

Langkah ini merupakan suatu kegiatan mengubah data hasil rekapitulasi data mejadi suatu informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian.

7. Tahap Pemecahan Masalah

Langkah ini merupakan suatu proses dimana suatu situasi diamati kemudian bila ditemukan adanya masalah dibuatkan penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, mengurangi atau menghilangkan masalah atau mencegah masalah tersebut terjadi.

8. Kesimpulan Dan Saran

Merupakan tahapan memberikan kesimpulan pada penelitian hal ini dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa apa saja yang menjadi untuk menimpulkan masalah-masalah apa yang telah kita dapatkan dan memberikan saran atau masukan untuk pemecahan masalah untuk dilakukan perbaikan.

9. Selesai

Ini adalah tahapan paling akhir dalam dalam penelitian.

3.2 Metode Pengumpulan Data Dan Jenis Data

3.2.1 Metode pengumpulan data

Dalam poses penelitian Kertas Kuliah Wajib ini banyak membutuhkan beberapa data dalam mencapai sasaran penulisan, dalam jalannya proses pengumpulan data menggunakan beberapa metode survey, adapun metode yang digunakan:

1) Observasi

Merupakan metode yang langsung turun ke lapangan dan melakukan pengamatan fasilitas daratan seperti pengukuran luas ruang tunggu, dermaga, lapangan parkir, serta beberapa pengamatan kelengkapan fasilitas daratan yang berada di pelabuhan penyeberangan torobulu, dan melakukan survey produktivitas 15 hari dipelabuhan torobulu.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi dapat berupa dokumen yang di publikasikan atau dokumen pribadi berupa foto, video, percakapan, rekaman (*tape recorder*), yang berhubungan dalam pelaksanaan penelitian, catatan lainnya. Dokumentasi yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian ini guna menguatkan hasil survey peneliti berupa foto-foto eksisting keadaan beberapa fasilitas pokok daratan yang ada di pelabuhan torobulu dan beberapa dokumentasi yang menunjukkan masalah yang terjadi di Pelabuhan torobulu yang Berbentuk Foto.

3) Studi Literatur

Yaitu dengan mempelajari teori - teori dan Buku – Buku serta Modul sebagai *referensi* dalam menganalisa dan pembahasan masalah. Peneliti juga membuat bagan alir penelitian, dimana dalam penulisan laporan ini dapat diidentifikasi semua data yang telah di kumpulkan, peneliti sendiri menggunakan literatur buku dan beberapa peraturan yang dapat mendukung penelitian yang telah diteliti.

4) Metode Instiusional

Dalam metode ini penulis mendapatkan data dari beberapa instansi- instansi yang telah penulis kunjungi demi mendapatkan data yang

relevan, adapun instansi-instansi yang telah dikunjungi penulis dalam mengumpulkan beberapa data yaitu Kantor PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang bau-bau berupa, Data Produktivitas tahunan pelabuhan, Data Spesifikasi Kapal, dan Sarana dan prasarana kapal

3.2.2 Jenis data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data untuk mendukung penelitian, dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data dengan menggunakan Survey atau langsung terjun kelapangan Yang didapatkan dengan menggunakan metode observasi, dan metode Dokumentasi.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang didapatkan dengan mengambil atau menggunakan data yang telah ada yang telah diteliti dari pihak – pihak terkait Yang didapatkan dengan menggunakan metode Literatur, dan metode Institusional.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis bertujuan untuk memudahkan di dalam penulisan serta mempermudah menganalisa penelitian. Analisa data dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut

1. Analisa dalam melakukan penelitian ini berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan di Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 52 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan. Dengan rumus sebagai berikut:

Luasan Ruang Tunggu

$$a_1 = a.n.N.x.y$$

Keterangan:

a = Luasan areal yang dibutuhkan untuk satu kapal (diambil 1,2 mt²/orang)

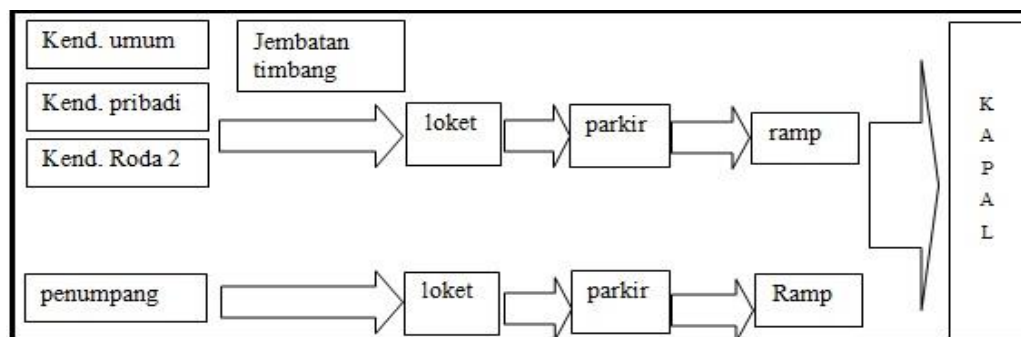
n = Jumlah penumpang dalam satu kapal

N = Jumlah kapal datang / berangkat pada saat yang bersamaan

x = Rasio konsentrasi (1,0-1,6)

y = Rata-rata fluktuasi (1,2)

- Analisa dalam penempatan jembatan timbang dengan melihat Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Tenis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan yang berada di lampiran II gambar 2 yaitu sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman
Tenis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

Gambar 3.2 Denah Penempatan Jembatan Timbang

- Analisa penempatan *gangway* naik kekapal untuk memisahkan jalan masuk penumpang dan kendaraan yang difungsikan untuk keselamatan

penumpang tersendiri, jika di satukan menjadi satu antara penumpang dan kendaraan akan dapat mencelakai penumpang sendiri sehingga gangway sangat dibutuhkan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.SK.2681/AP.005/DRJD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Pasal 6 ayat (1) point c, menjelaskan “*gangway* sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan.

BAB IV

OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Konawe Selatan adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara. Ibukota kabupaten ini terletak di Andoolo. Kabupaten Konawe Selatan secara geografis terletak di bagian Selatan Khatulistiwa, melintang dari utara utara ke selatan antara $3^{\circ}58'56''$ dan $4^{\circ}31'52''$ Lintang Selatan, dan membujur dari barat ke timur antara $121^{\circ}58'$ dan $123^{\circ}16'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalah sekitar $5.779,47$ Km^2 , atau $15,15\%$ dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara yaitu 38.140 Km^2 , sedangkan luas wilayah perairan (laut) adalah mencapai 9.368 Km^2 , dengan panjang garis pantai mencapai ± 200 Km, dengan demikian luas wilayah daratan dan laut mencapai $15.147,47$ Km^2 . Seperti daerah-daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Konawe Selatan dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keadaan musim banyak dipengaruhi oleh arus angin yang bertiup diatas wilayahnya. Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari 25 kecamatan dengan 95 desa pesisir dan 266 desa non-pesisir yang terdiri dari 337 desa definitif, 9 desa persiapan dan 15 Kelurahan.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Tinanggea	Tinanggea	354,74
2.	Lalembuu	Atari Indah	204,80
3.	Andoolo	Andoolo	103,61
4.	Buke	Buke	185,61
5.	Andoolo Barat	Anese	75,46
6.	Palangga	Palangga	177,83
7.	Palangga Selatan	Lakara	110,21
8.	Baito	Baito	152,71
9.	Lainea	Lainea	210,11
10.	Laeya	Punggaluku	277,96
11.	Kolono	Kolono	344,59
12.	Kolono Timur	Tumbu-Tumbu Jaya	122,80
13.	Laonti	Ulusawah	406,63
14.	Moramo	Lapuko	237,89
15.	Moramo Utara	Lalowaru	189,05
16.	Konda	Konda	132,84
17.	Wolasi	Aoma	160,28
18.	Ranomeeto	Ranomeeto	96,57
19.	Ranomeeto Barat	Lameuru	76,07
20.	Landono	Landono	125,00
21.	Mowila	Mowila	127,41
22.	Sabulakoa	Sabulakoa	68,50
23.	Angata	Motaha	329,54
24.	Benua	Horodopi	138,31
25.	Basala	Basala	105,68
	Konawe Selatan	Andoolo	4514,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan, 2021

4.1.3 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020 berjumlah 308.524 jiwa yang tersebar sebanyak 25 kecamatan. Dari 25 kecamatan, kecamatan Tinanggea yang mempunyai jumlah penduduk terbesar sebanyak 24.971 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di kecamatan Kolono Timur sebanyak 5.360 jiwa.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, 2020

No	Kecamatan	Penduduk	Sebaran Penduduk
		(Jiwa)	(%)
1	2	3	4
<i>b</i> 1.	Tinanggea	24.971	8,09
<i>e</i> 2.	Lalembuu	16.057	5,20
<i>r</i> 3.	Andoolo	10.563	3,42
4.	Buke	14.558	4,72
5.	Andoolo Barat	8.751	2,84
<i>i</i> 6.	Palangga	14.792	4,79
7.	Palangga Selatan	7.392	2,40
<i>B</i> 8.	Baito	9.004	2,92
<i>a</i> 9.	Lainea	10.038	3,25
<i>d</i> 10.	Laeya	21.458	6,96
11	Kolono	11.397	3,69
<i>a</i> 12	Kolono Timur	5.360	1,74
<i>n</i> 13	Laonti	10.309	3,34
14	Moramo	15.634	5,07
<i>P</i> 15	Moramo Utara	8.867	2,87
<i>u</i> 16	Konda	21.724	7,04
<i>s</i> 17	Wolasi	5.656	1,83
<i>a</i> 18	Ranomeeto	21.049	6,82
19	Ranomeeto Barat	7.986	2,59
<i>t</i> 20	Landonu	8.392	2,72
21	Mowila	13.700	4,44
<i>S</i> 22	Sabulakoa	5.436	1,76
<i>t</i> 23	Angata	16.811	5,45
<i>a</i> 24	Benua	10.897	3,53
<i>t</i> 25	Basala	7.722	2,50
Konawe Selatan		308.524	

stik Kabupaten Konawe Selatan, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Tinanggea dengan jumlah penduduk mencapai 24.971 jiwa dari 308.524 jiwa jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan untuk kecamatan dengan sebaran penduduk terbanyak ialah kecamatan Tinanggea dengan sebaran 8,09 %.

4.2 Sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Sarana transportasi berperan sebagai alat perhubungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga segala kegiatan, seperti pertanian, perindustrian dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Sarana transportasi angkutan penyeberangan sangat mendukung dalam pelayanan dan kinerja dari pelabuhan itu sendiri. Sarana transportasi di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu dilayani oleh 2 Kapal Motor Penyeberangan milik PT. ASDP yaitu KMP. Nuku dan KMP. Rubiah. Berikut ini spesifikasi kapal yang beroperasi di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu dapat dilihat sebagai berikut :

1. KMP. Pulau Rubiah



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.2 KMP. Pulau Rubiah

Berikut ini merupakan *Ship Particular* KMP. Pulau Rubiah yang mencakup spesifikasi kapal yang ada secara lengkap

Tabel 4.4 *Ship Particular* KMP. Pulau Rubiah

URAIAN	KETERANGAN
Nama Kapal	KMP. PULAU RUBIAH
Tempat Pembuatan/Galangan	PT. DAYA RADAR UTAMA JAKARTA
Tahun Pembuatan	1995
Tanda Panggilan/Call Sign	YFOS
Lintasan	Tampo - Torobulu
Tipe Kapal	<i>Roll On Roll Off</i>
Ukuran Utama	
Panjang Seluruh (LOA)	39,00 M
Panjang (LBP)	34,70 M
Lebar (B)	10,50 M
Dalam (D)	2,90 M
Sarat Air (d)	2,20 M
GRT/NT	485 GT – 146 NT
Mesin Utama	
Merk	YANMAR
Type	6 LAA-UTE
Tenaga Kuda/PK	2 x 530 PK
Jumlah Mesin	2 Unit
Kecepatan Operasi	7 Knot
RPM	1850 RPM
Tahun Pembuatan Mesin	1996
Jenis Bahan Bakar	Solar HSD
Nomor Mesin	Kiri : 270 (K) 6093 (PS) Kanan : 812 (K) 6094 (SB)
Generator Mesin Bantu	
Model	CHANGCHAI & PERKINS
Type	1105-1 & 63544 M
Jumlah Mesin	3 Unit
Tenaga Kuda/HP	2 x 67,95 HP
RPM	1500 RPM
KVA	50 KVA
Kapasitas Tangki	
Tangki Bahan Bakar	25 Ton
Tangki Air Tawar	40 Ton
Tangki Ballast	60 Ton
Kapasitas Muat	
Jumlah Penumpang	300 Orang
Jumlah Kendaraan	14 Unit

URAIAN	KETERANGAN
Jumlah ABK	15 Orang
Pintu Rampa	
Pintu Rampa Haluan	Panjang : 6 M Lebar : 4 M
Pintu Rampa Buritan	Panjang : 6 M Lebar : 4 M
<i>Car Deck</i>	
Tinggi <i>Car Deck</i> Haluan	3,50 M

Sumber : PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-Bau, 2021

2. KMP. Nuku



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.3 KMP. Nuku

Berikut ini merupakan *Ship Particular* KMP. Pulau Rubiah yang mencakup spesifikasi kapal yang ada secara lengkap

Tabel 4.5 *Ship Particular* KMP. Nuku

URAIAN	KETERANGAN
Nama Kapal	KMP. NUKU
Tempat Pembuatan/Galangan	PT. ADI LUHUNG SARANA SEGARA IND, MADURA
Tahun Pembuatan	1995
Tanda Panggilan/Call Sign	YDQJ
Lintasan	Tampo - Torobulu

URAIAN	KETERANGAN
Tipe Kapal	<i>Roll On Roll Off</i>
Ukuran Utama	
Panjang Seluruh (LOA)	34,94 M
Panjang (LBP)	34,70 M
Lebar (B)	10,50 M
Dalam (D)	2,90 M
Sarat Air (d)	1,80 M
GRT/NT	410 GT – 123 NT
Mesin Utama	
Merk	YANMAR
Type	6 LAA-UTE
Tenaga Kuda/PK	2 x 530 PK
Jumlah Mesin	2 Unit
Kecepatan Operasi	6,5 Knot
RPM	1850 RPM
Tahun Pembuatan Mesin	1995
Jenis Bahan Bakar	Solar HSD
Nomor Mesin	Kiri : 0619 (PS) Kanan : 0620 (SB)
Generator Mesin Bantu	
Model	MWM
Type	D 226-6
Jumlah Mesin	2 Unit
Tenaga Kuda/HP	2 x 70 HP
RPM	1500 RPM
KVA	50 KVA
Kapassitas Tangki	
Tangki Bahan Bakar	24 Ton
Tangki Air Tawar	46 Ton
Tangki Ballast	84 Ton
Kapasitas Muat	
Jumlah Penumpang	250 Orang
Jumlah Kendaraan	14 Unit
Jumlah ABK	18 Orang
Pintu Rampa	
Pintu Rampa Haluan	Panjang : 6 M Lebar : 4 M
Pintu Rampa Buritan	Panjang : 6 M Lebar : 4 M
<i>Car Deck</i>	
Tinggi <i>Car Deck</i> Haluan	3,50 M
Tinggi <i>Car Deck</i> Buritan	3,50 M

Sumber: PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-Bau, 2021

4.3 Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk menunjang kelancaran kegiatan transportasi terutama pada Pelabuhan Penyeberangan Torobulu diperlukan prasarana yang baik. Pada pelabuhan ini tersedia beberapa fasilitas untuk jalannya kegiatan yang rutin dilakukan seperti pelayanan terhadap penumpang dan kendaraan. Adapun Prasarana yang tersedia pada Pelabuhan Penyeberangan Torobulu sebagai berikut :

4.3.1 Fasilitas Daratan

1. Lapangan Parkir

Lapangan Parkir digunakan untuk kendaraan mobil dan motor pengantar dan penjemput penumpang.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.4 Lapangan Parkir

2. Ruang Tunggu Penumpang

Ruang tunggu penumpang berfungsi untuk penumpang yang menunggu kedatangan kapal.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.5 Ruang Tunggu Penumpang

3. Loket Penumpang dan Kendaraan

Loket yang ada di Pelabuhan penyeberangan Torobulu berfungsi untuk penjualan tiket penumpang dan kendaraan.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.6 Loket Penumpang dan Kendaraan

4. Kantor Administrasi

Kantor Administrasi dipergunakan untuk aktivitas penyeberangan dalam rangka menciptakan pelayanan yang optimal terhadap pelayanan pengguna jasa.

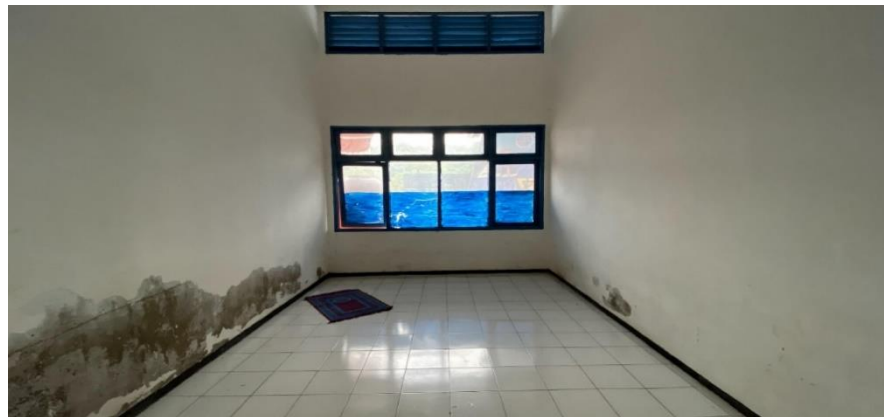


Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.7 Kantor Administrasi

5. Musholla

Musholla adalah tempat atau rumah kecil yang menyerupai masjid yang digunakan oleh penumpang sebagai tempat sholat dan mengaji bagi umat islam.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.8 Musholla

6. Toilet

Fasilitas sanitasi atau toilet yang berfungsi untuk tempat buang air kecil dan air besar yang disediakan untuk penumpang baik ketika hendak naik atau turun dari kapal.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.9 Toilet

7. Kantin

Kantin berfungsi sebagai tempat persediaan makanan, minuman, dll pada pelabuhan.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.10 Kantin

8. Jembatan Timbang

Jembatan timbang digunakan untuk menghitung berat muatan kendaraan yang ingin memasuki kapal agar tidak ada kendaraan yang melebihi muatan dari golongan kendaraan yang seharusnya.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.11 Jembatan Timbang

9. Halte

Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.12 Halte

10. Pos Pengecekan Tiket

Pos pengecekan tiket berfungsi mengecek tiket penumpang sebelum memasuki kapal



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.13 Pos Pengecekan Tiket

1.3.2 Fasilitas Perairan

1. Dermaga (*Moveable Bridge*)

Dermaga di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu merupakan dermaga tipe MB (*Moveable Bridge*) yang digunakan untuk akses kapal bongkar muat barang dan penumpang kapal.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.14 Dermaga (Moveable Bridge)

2. *Trestle*

Trestle merupakan jalan/akses dari daratan menuju ke dermaga yang digunakan pada pelabuhan yang perairannya dangkal pada garis pantai.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.15 Trestle

3. Gangway

Gangway digunakan untuk akses jalan penumpang dari pintu portal menuju ke dermaga.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.16 Gangway

4. Rumah MB

Rumah MB digunakan untuk mengatur *Moveable Bridge* pada dermaga agar dapat disesuaikan dengan ketinggian muka air.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.17 Rumah Moveable Bridge

5. *Bolder*

Bolder berfungsi sebagai tempat untuk tambat kapal yang akan bersandar ke dermaga



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.18 *Bolder*

6. *Fender*

Fender berfungsi sebagai peredam gesekan antara kapal dengan dermaga pada saat kapal sandar



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.19 *Fender*

7. *Catwalk*

Catwalk digunakan petugas pelabuhan untuk menuju bolder yang terletak di dolphin pada saat kapal akan sandar dan pada saat kapal mulai berlayar.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.20 *Catwalk*

8. *Dolphin*

Dolphin adalah tempat kapal bersandar pada dermaga yang dibangun pada trestel. Pada dolphin ini kapal ditambatkan pada bolder, dan dilengkapi dengan fender untuk meredam benturan kapal pada dolphin.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Dishub Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Gambar 4.21 *Dolphin*

4.4 Instansi Pembina Transportasi

Pembina angkutan di Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Langara dan Pelabuhan Penyeberangan Torobulu-Tampo adalah Balai Pengelola Transportasi Darat XVIII Sulawesi Tenggara sebagai pengawas operator pelabuhan dan kapal sedangkan yang menjadi operator Pelabuhan adalah UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Wawoni, dan UPTD Pelabuhan Penyeberangan Torobulu-Tampo dibawah naungan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan yang menjadi operator kapal adalah PT. ASDP Cabang Bau-Bau.

1. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan fokus sub urusan Lalu Lintas Angkuan Jalan dan Pelayaran, wilayah geografis kepulauan dengan status tipe A (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016), dan atau kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 66 Tahun 2016)

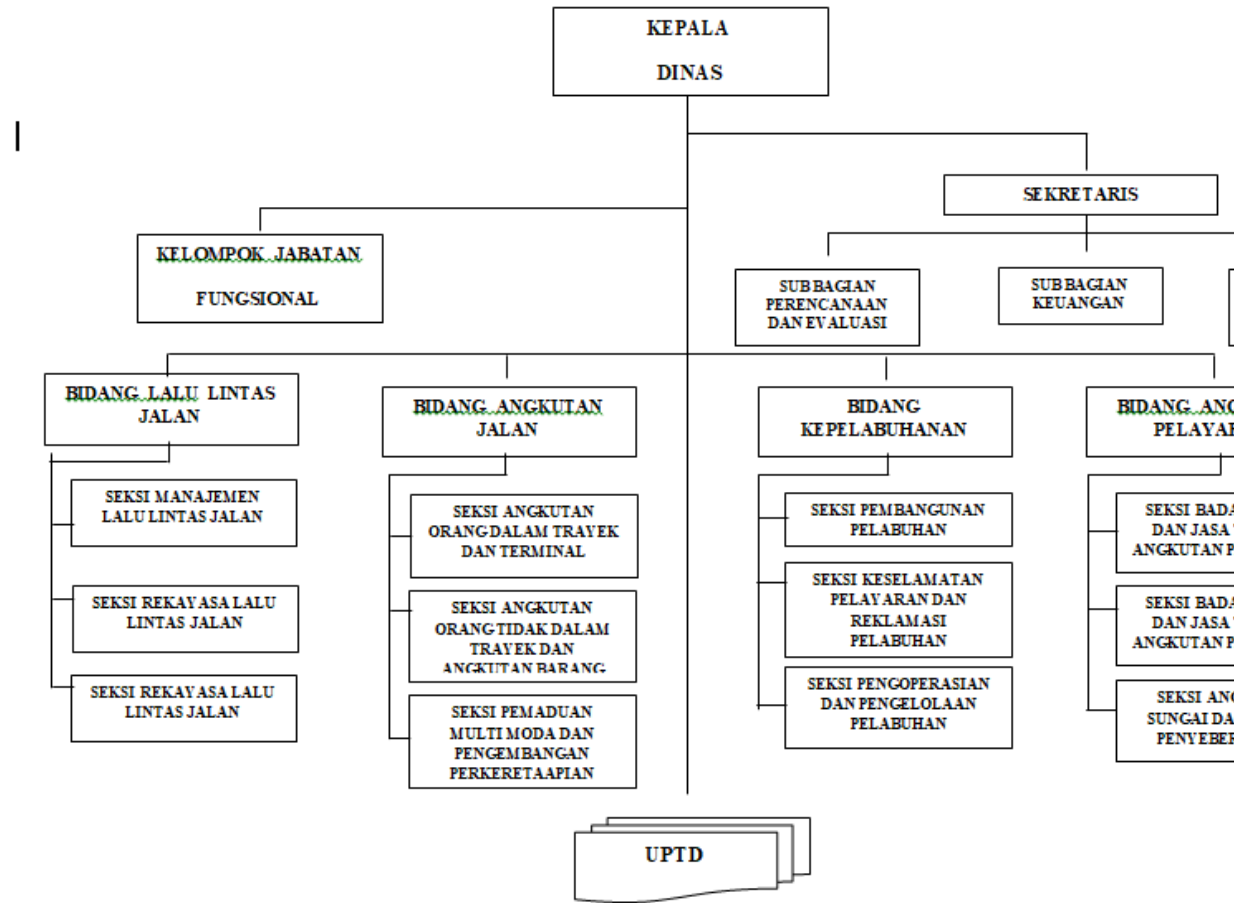
VISI : “Terwujudnya Penyediaan dan Pelayanan Jasa Transportasi, dan informasi sertor perhubungan yang Handal, dan Memberi kepuasan Kepada Pengguna Jasa Serta Menunjang Pembangunan Sektor-sektor Lain.”

MISI :

- a. Peningkatan penyediaan sarana prasarana tranportasi darat, laut, udara serta informasi sektro perhubungan yang diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan daerah.
- b. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan.

- c. Peningkatan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor unggulan
- d. Peningkatan peranan sistem informasi sektor perhubungan

4.4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara



Gambar 4.22 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

4.4.2 Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

Fungsi Kepala Dinas :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintah Bidang Perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas
- b. Pengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan
- c. Pengoordinasian urusan, umum, kepegawaian dan hukum
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Dalam menjalankan tugasnya sekretaris terbagi dalam 3 bagian yaitu :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Program dipimpin oleh kepala subagian yang mempunyai tugas mebantu sekretaris dalam merencanakan dan melakukan evaluasi penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, kepegawaian, dan hokum dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian keuangan yang mempunyai tugas mebantu sekretaris dalam mengumpulkan bahasn dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis lalu lintas jalan.

Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Lalu Lintas Jalan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Lalu Lintas Jalan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Lalu Lintas Jalan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Dalam menjalankan tugasnya bidang lalu lintas jalan terbagi dalam 3 bagian yaitu :

a) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen

b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas

c) bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan system dan multimoda serta pengembangan perkertapaian melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkeretaapian.

4. Bidang Kepelabuhanan

Bidang Kepelabuhanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kepelabuhanan.

Fungsi Bidang Kepelabuhanan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepelabuhanan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kepelabuhanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepelabuhanan
- d. Pelaksanaan administrasi bidang kepelabuhanan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Dalam menjalankan tugasnya bidang kepelabuhanan terbagi dalam 3 bagian yaitu :

a) Seksi Pembangunan Pelabuhan

Seksi Pembangunan Pelabuhan dipimpin oleh Kepala Seksi pembangunan Pelabuhan yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Kepelabuhanan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan pelabuhan

b) Seksi Keselamatan Pelayaran dan Reklamasi Pelabuhan

Seksi Keselamatan Pelayaran dan Reklamasi pelabuhan dipimpin oleh Kepala Seksi keselamatan pelayaran dan reklamasi pelabuhan yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Kepelabuhanan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis keselamatan pelayaran dan reklamasi pelabuhan.

c) Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.

Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan dipimpin oleh Kepala Seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Kepelabuhanan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan.

5. Bidang Angkutan Pelayaran

Bidang Angkutan Pelayaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kepelabuhanan.

Fungsi Bidang Angkutan Pelayaran sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Angkutan Pelayaran
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Angkutan Pelayaran
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayaran
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Angkutan Pelayaran, dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Dalam menjalankan tugasnya bidang angkutan pelayaran terbagi dalam 3 bagian yaitu :

a) Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan Pelayaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

b) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat

Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan Pelayaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Angkutan Pelayaran Rakyat.

c) Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

Seksi Angkutan Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan Pelayaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

4.5 Produktivitas Angkutan

KMP. Nuku dan KMP. Pulau Rubiah merupakan kapal ferry jenis RO-RO yang melayani lintas Torobulu-Tampo. Rata-rata trip yang dilakukan kapal ini yakni 4 trip per hari. Adapun data produktivitas yang diperoleh yaitu data produktivitas lima tahun terakhir dan data produktivitas lima belas hari yang dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu.

4.5.1 Produktivitas Penumpang dan Kendaraan 5 Tahun Terakhir

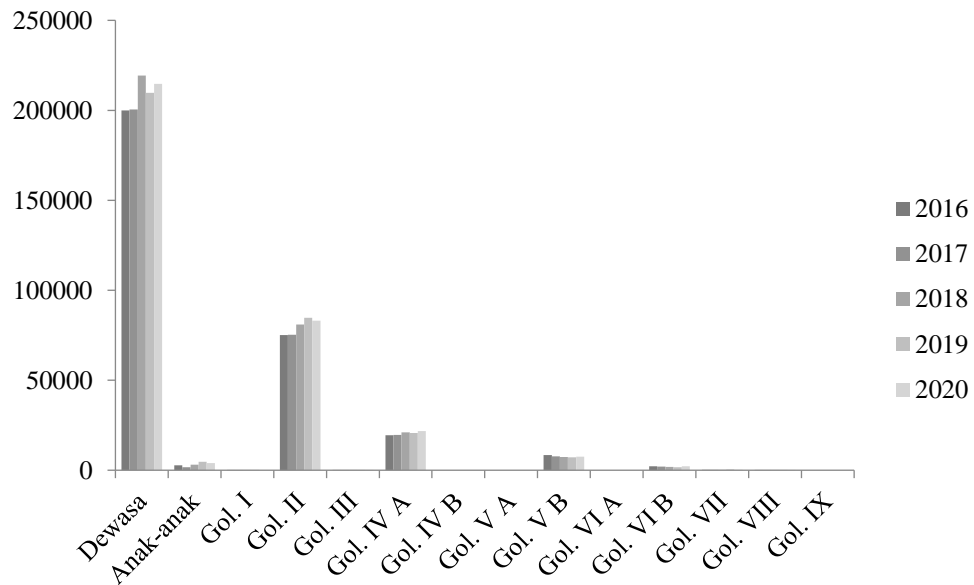
Data produktivitas penumpang dan kendaraan 5 tahun terakhir didapatkan dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-Bau. Berikut data produktivitas penumpang dan kendaraan 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 Produktivitas Penumpang dan Kendaraan 5 Tahun Terakhir

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Trip	2.495	2.700	2.891	2.635	2.687
Dewasa	199.881	200.536	219.392	209.649	214.707
Anak-anak	2.685	1.662	3.125	4.629	4.050
Sub Jumlah	202.566	202.198	222.517	214.278	218.757
Golongan I	2	4	27	1	0
Golongan II	75.088	75.289	80.936	84.638	83.194
Golongan III	6	10	8	2	13
Golongan IV A	19.384	19.628	20.974	20.753	21.819
Golongan IV B	0	0	0	0	0
Golongan V A	0	0	0	0	0
Golongan V B	8.384	7.667	7.387	7.185	7.568
Golongan VI A	0	0	0	0	0
Golongan VI B	2.256	2.099	1.797	1.601	2.176
Golongan VII	204	181	329	365	262
Golongan VIII	107	108	85	75	33
Golongan IX	0	0	0	0	0
Jumlah	105.431	104.986	111.543	114.620	115.065

Sumber: PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-Bau, 2021

Berikut ini grafik produktivitas penumpang dan kendaraan 5 tahun terakhir :



Gambar 4.23 Grafik Produktivitas Penumpang dan Kendaraan 5 Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel dan grafik produktivitas penumpang dan kendaraan 5 tahun terakhir diatas, dapat dilihat bahwa tingkat produktivitas setiap tahunnya cenderung berubah. Selain itu juga terlihat bahwa tingkat produktivitas tertinggi kendaraan golongan II pada tahun 2019.

4.5.2 Produktivitas Penumpang dan Kendaraan Selama 15 Hari di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021

Penulis telah melakukan survei produktivitas keberangkatan dan kedatangan penumpang dan kendaraan selama 15 hari dimulai dari tanggal 17

Maret 2021 sampai 31 Maret 2021. Data produktivitas keberangkatan penumpang dan kendaraan selama satu bulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7 Produktivitas Keberangkatan Penumpang dan Kendaraan Selama 15 Hari di Lintasan penyeberangan Torobulu - Tampo

No.	Tanggal	KEBERANGKATAN											
		PNP	Kendaraan Golongan										
			I	II	III	IVA	IVB	VA	VB	VIA	VIB	VII	VIII
1	17 Maret 2021	181	-	70	-	30	-	13	-	-	-	-	-
2	18 Maret 2021	219	-	100	-	32	-	9	-	-	-	-	-
3	19 Maret 2021	162	-	75	-	25	-	9	-	-	-	-	-
4	20 Maret 2021	251	-	79	-	29	-	11	-	-	-	-	-
5	21Maret 2021	292	-	148	-	23	-	13	-	-	-	-	-
6	22 Maret 2021	238	-	95	-	27	-	10	-	-	-	-	-
7	23Maret 2021	186	-	78	-	25	-	16	-	-	-	-	-
8	24 Maret 2021	209	-	88	-	26	-	13	-	-	-	-	-
9	25 Maret 2021	199	-	75	-	35	-	8	-	-	-	-	-
10	26 Maret 2021	160	-	75	-	17	-	9	-	-	-	-	-
11	27 Maret 2021	171	-	79	-	14	-	13	-	-	-	-	-
12	28 Maret 2021	469	-	182	-	44	-	10	-	-	-	-	-
13	29 Maret 2021	286	-	139	-	26	-	11	-	-	-	-	-
14	30 Maret 2021	242	-	94	-	24	-	16	-	-	-	-	-
15	31 Maret 2021	314	-	135	-	43	-	9	-	-	-	-	-

Sumber: PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-Bau, 2021

Tabel 4.8 Produktivitas Kedatangan Penumpang dan Kendaraan Selama 15 Hari di Lintasan Penyeberangan
Tampo - Torobulu

No.	Tanggal	KEDATANGAN											
		PNP	Kendaraan Golongan										
			I	II	III	IVA	IVB	VA	VB	VIA	VIB	VII	VIII
1	17 Maret 2021	210	-	86	-	18	-	16	-	-	-	-	-
2	18 Maret 2021	309	-	121	-	29	-	12	-	-	-	-	-
3	19 Maret 2021	367	-	132	-	23	-	11	-	-	-	-	-
4	20 Maret 2021	320	-	117	-	28	-	11	-	-	-	-	-
5	21Maret 2021	314	-	100	-	32	-	8	-	-	-	-	-
6	22 Maret 2021	317	-	112	-	28	-	10	-	-	-	-	-
7	23Maret 2021	291	-	120	-	30	-	6	-	-	-	-	-
8	24 Maret 2021	309	-	101	-	25	-	12	-	-	-	-	-
9	25 Maret 2021	309	-	114	-	25	-	9	-	-	-	-	-
10	26 Maret 2021	371	-	149	-	25	-	9	-	-	-	-	-
11	27 Maret 2021	363	-	137	-	28	-	9	-	-	-	-	-
12	28 Maret 2021	400	-	161	-	35	-	14	-	-	-	-	-
13	29 Maret 2021	319	-	102	-	31	-	19	-	-	-	-	-
14	30 Maret 2021	308	-	86	-	28	-	12	-	-	-	-	-
15	31 Maret 2021	306	-	86	-	31	-	12	-	-	-	-	-

Sumber: PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-Bau, 2021

BAB V

HASIL DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 Perhitungan Ruang Tunggu

Dari bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dilihat dari kondisi di lapangan, terdapat beberapa permasalahan mengenai fasilitas darat yang menunjang kegiatan operasional pelabuhan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Bira, adapun analisa yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Perhitungan Luasan Ruang Tunggu Penumpang

Luas areal ruang tunggu untuk penumpang dihitung dengan rumus sebagai berikut :



Sumber : Hasil Analisa Tim PKL Torobulu (2021)

Gambar 5.1 Kondisi eksisting luas ruang tunggu masih belum sesuai dan masih belum di fungsikan dengan baik

$$A_1 = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y$$

Keterangan :

A_1 = Luas ruang tunggu (m^2)

a = Persyaratan luas ruang untuk 1 orang ($1,2 m^2 / \text{orang}$)

n = Jumlah penumpang dalam satu kapal

N = Jumlah kapal datang/berangkat pada saat yang bersamaan

x = Rasio konsentrasi (1,0 s/d 1,6)

y = Rata-rata fluktuasi (1,2)

Penentuan jumlah penumpang dalam 1 (satu) kapal diambil berdasarkan kapasitas angkut penumpang terbesar yaitu 469 orang pada kapal KMP.Nuku. Sedangkan penentuan jumlah kapal yang datang dan pergi bersamaan ditetapkan 1 (satu) dikarenakan kapal dan dermaga yang tersedia/terpakai hanya berjumlah 1 (satu) unit.

Table 5.1 Produktivitas Penumpang dan Barang Selama 15 Hari di Lintasan
Penyeberangan Torobulu-Tampo

No.	Tanggal	Golongan kendaraan												jumlah kendaraan
		pnp	I	II	III	IVA	IVB	VA	VB	VIA	VIB	VII	VIII	
1	17 Maret 2021	181	-	70	-	30	-	13	-	-	-	-	-	113
2	18 Maret 2021	219	-	100	-	32	-	9	-	-	-	-	-	141
3	19 Maret 2021	162	-	75	-	25	-	9	-	-	-	-	-	104
4	20 Maret 2021	251	-	79	-	29	-	11	-	-	-	-	-	119
5	21Maret 2021	292	-	148	-	23	-	13	-	-	-	-	-	174
6	22 Maret 2021	238	-	95	-	27	-	10	-	-	-	-	-	132
7	23Maret 2021	186	-	78	-	25	-	16	-	-	-	-	-	119
8	24 Maret 2021	209	-	88	-	26	-	13	-	-	-	-	-	127
9	25 Maret 2021	199	-	75	-	35	-	8	-	-	-	-	-	118
10	26 Maret 2021	160	-	75	-	17	-	9	-	-	-	-	-	101

11	27 Maret 2021	171	-	79	-	14	-	13	-	-	-	-	-	106
12	28 Maret 2021	469	-	182	-	44	-	10	-	-	-	-	-	236
13	29 Maret 2021	286	-	139	-	26	-	11	-	-	-	-	-	176
14	30 Maret 2021	242	-	94	-	24	-	16	-	-	-	-	-	134
15	31 Maret 2021	314	-	135	-	43	-	9	-	-	-	-	-	187

Sumber: PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) cabang Baubau

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk menentukan rasio konsentrasi penumpang dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Konsentrasi (x)} &= \frac{\text{Jumlah pnp terbanyak perhari/trip}}{\text{Kapasitas pnp dalam satu kapal}} \\
 &= \frac{469 \text{ penumpang}}{250 \text{ penumpang}} \\
 &= 1,9 \sim 1,0
 \end{aligned}$$

Jadi, rasio konsentrasi (x) adalah 1,0

Maka, dari data di atas dapat diperhitungkan :

$$A1 = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y$$

$$\begin{aligned}
 A1 &= 1,2 \text{ m}^2/\text{orang} \cdot 469 \text{ penumpang/kapal} \cdot 1 \text{ Kapal} \cdot 1 \cdot 1,2 \\
 &= 675,36 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

Untuk menentukan kapasitas tampung dari luasan ruang tunggu berdasarkan analisa di atas dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Kursi} = \frac{\text{Luasan ruang tunggu efektif}}{\text{Luasan untuk penumpang}}$$

$$\text{Luasan untuk penumpang} = 1,2 \text{ m}^2/\text{orang}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Maka, Jumlah Kursi} &= \frac{675,63 \text{ m}^2}{1,2 \text{ m}^2} \\
 &= 562 \text{ Kursi}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan luasan kebutuhan ruang tunggu, maka dibutuhkan ruang tunggu penumpang sebesar 675,36 m² dan dibutuhkan jumlah kursi sebanyak 562 kursi.

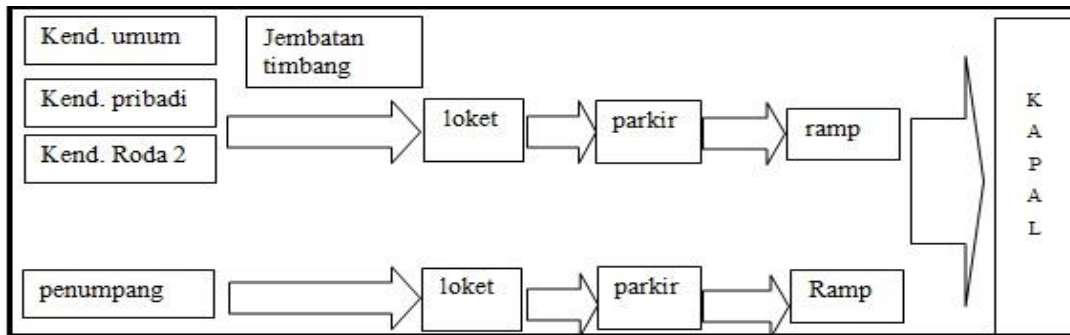
5.2. Penentuan lokasi penempatan jembatan timbang.

Jembatan merupakan sebuah fasilitas di pelabuhan yang berfungsi untuk menimbang berat sebuah kendaraan yang akan masuk kedalam sebuah kapal penyeberangan, fungsi dalam menimbang kendaraan yaitu untuk mengetahui berat kendaraan yang akan melintasi jembatan MB, karena jembatan MB memiliki batas maksimal dalam menahan beban kendaraan yang akan lewat di atasnya, untuk MB di pelabuhan Torobulu sendiri memiliki beban maksimum yaitu 20 ton, sehingga dengan adanya jembatan timbang ini akan dapat membuat insiden seperti patahnya jembatan MB tidak terjadi lagi, dan penempatan jembatan timbang ini juga ada dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan yaitu:



Sumber : Hasil Analisa Tim PKL Torobulu (2021)

Gambar 5.2 kondisi eksisting penempatan jembatan timbang yang masih belum sesuai tidak difungsikan dengan baik



manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

Gambar 5.1 Denah Jembatan Timbang

5.3. Perencanaan *gangway* menuju kekapal

Gangway merupakan jalan khusus penumpang pejalan kaki untuk dapat menaiki kapal, *gangway* ini berfungsi untuk memisahkan jalan masuk penumpang dan kendaraan agar memudahkan operasional pelabuhan dan untuk keamanan penumpang sendiri, *gangway* merupakan sebuah fasilitas pokok pelabuhan yang harus dilengkapi pada pelabuhan, hal ini ada di Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan pasal 6 ayat (5), yang menjelaskan harus ada akses keluar masuk penumpang di kapal dan di Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.SK.2681/AP.005/DRJD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Pasal 6 ayat (1) point c, menjelaskan “*gangway* sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan”, di pelabuhan Torobulu sendiri telah memiliki *gangway* tapi *gangway* tersebut belum dapat memisahkan jalan antara penumpang dan kendaraan ketika masuk kapal dikarenakan *gangway* yang ada sekarang hanya tersedia sampai didepan pintu rampa sehingga penumpang sendiri masih menggunakan satu pintu yang sama yang dipakai untuk kendaraan masuk kekapal selain menyalahi aturan juga dapat membahayakan penumpang sendiri. sehingga hasil analisa TIM PKL sulawesi tenggara agar untuk ditambah *gangway* yang berada di samping kapal yang berfungsi untuk membedakan jalan masuk ke kapal.



Sumber : Hasil Analisa Tim PKL Torobulu (2021)

Gambar 5.3 tidak ada pembatas antara *gangway* dan jalan kendaraan

5.4. Analisis Lapangan Parkir Siap Muat

Dilakukan perhitungan berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan. Berikut luas lapangan parkir siap muat yang dibutuhkan



Gambar 5.4 Kondisi eksiting lapangan parker pengantar/ penjemput

$$A = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y$$

Keterangan:

A = Luas Total Areal Parkir Untuk Kendaraan Menyeberang.

a = Luas Areal yang dibutuhkan untuk satu unit kendaraan:

$$\text{Gol VII} = 60 \text{ m}^2$$

$$\text{Gol VI} = 45 \text{ m}^2$$

$$\text{Gol V} = 25 \text{ m}^2$$

$$\text{Gol IV} = 25 \text{ m}^2$$

n = Jumlah kendaraan dalam satu kapal

N = Jumlah kapal Datang/Berangkat Pada Saat Bersamaan.

x = Rata – rata pemanfaatan (1,0)

y = Rasio Konsentrasi diambil (1,2)

Untuk menentukan proporsi kendaraan, diambil dari total kendaraan per golongan dibagi total produksi kapal selama 15 hari dapat dilihat pada tabel 5.1

Maka rumus proporsi kendaraan adalah : $\frac{\sum \text{Per Golongan Kendaraan}}{\text{Total Produksi}} \times 100\%$

Dari tabel 5.1 didapatkan data sebagai berikut:

$$(1) \text{ Golongan IV A + IV B} = 403 \text{ kendaraan}$$

$$(2) \text{ Golongan V A + V B} = 170 \text{ kendaraan}$$

$$\text{Total produksi (1), dan (2)} = 14 \text{ kendaraan}$$

Maka perhitungannya sebagai berikut:

$$(1) \text{ Proporsi kendaraan golongan IV} = \frac{403 \text{ Kendaraan}}{14} \times 100\% \\ = 70 \%$$

$$(2) \text{ Proporsi kendaraan golongan V} = \frac{170 \text{ Kendaraan}}{14} \times 100\% \\ = 30 \%$$

Jumlah kendaraan dalam 1 kapal yaitu 14 unit kendaraan campuran diambil dari KMP. Nuku.

Jadi untuk menentukan jumlah kendaraan dalam satu kapal

$$\text{Kendaraan golongan IV} = 70 \% \times 14 = 281 \text{ Unit}$$

$$\text{Kendaraan golongan V} = 30 \% \times 14 = 51 \text{ Unit}$$

Maka, luasan lapangan parkir siap muat untuk tiap golongan adalah :

(1) (Gol. V A / V B)

$$A_3 = a . n . N . x . y$$

$$A_3 = 25 \text{ m}^2 \times (14 \times 30\%) \times 1 \times 1 \times 1,2$$

$$A_3 = 120 \text{ m}^2$$

(2) (Gol IV A / IV B)

$$A_4 = a . n . N . x . y$$

$$A_4 = 25 \text{ m}^2 \times (14 \times 70\%) \times 1 \times 1 \times 1,2$$

$$A_4 = 300 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi, } A_{\text{Total}} &= 120 \text{ m}^2 + 300 \text{ m}^2 \\ &= 420 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Dari perhitungan luasan berdasarkan kebutuhan lapangan parkir siap muat , dibutuhkan lapangan parkir siap muat yaitu sebesar 420 m² dengan ukuran 210 m x 210 m.

5.5 Usulan pemecahan masalah

1. Ruang Tunggu Penumpang

Menurut hasil analisa yang telah didapat bahwa luas efektif untuk ruang tunggu di Pelabuhan penyeberangan Torobulu sebesar 562,8 m² dan untuk luasan tersebut membutuhkan fasilitas tempat duduk sebanyak 469 kursi. Berikut ini adalah gambar kondisi rencana luasan ruang tunggu penumpang di Pelabuhan penyeberangan Torobulu.



Gambar 5.2 Kondisi Ruang Tunggu Rencana

2. Jembatan Timbang

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan dan SK.242 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan, bahwa posisi jembatan timbang ditempatkan sebelum *tollgate* kendaraan.

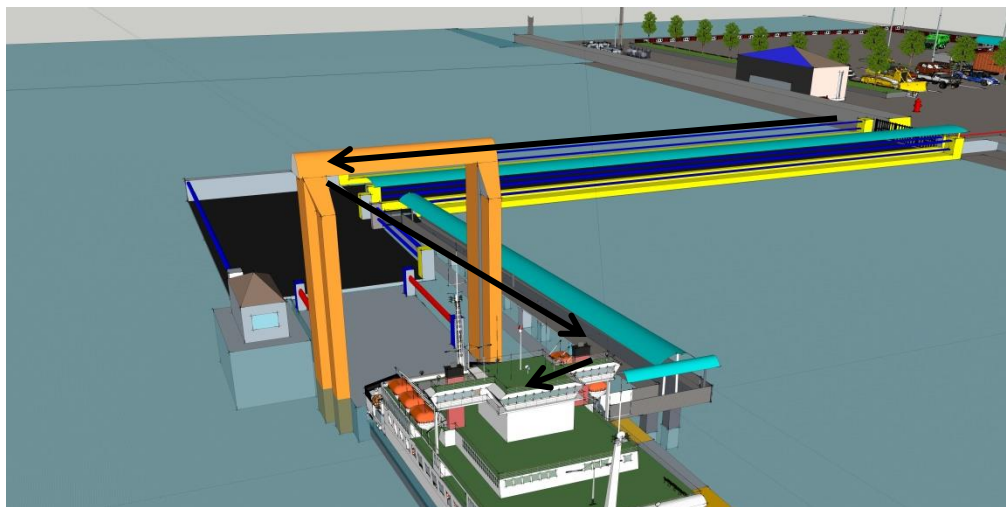


sumber : hasil analisa 2021

Gambar 5.3 penempatan jembatan timbanag rencana

3. *Gangway* rencana

Pada rencana yang telah di masukkan bisa dilihat arus perjalanan yang akan di tempuh oleh penumpang ke kapal sehingga dapat melancarkan operasional pelabuhan,



Sumber hasil analisa 2021

Gambar 5.3. Gambar *Gangway* Rencana

Dalam rencana diatas bisa dilihat penulis memiliki rencana untuk menyambungkan *gangway* yang telah ada dengan gangway yang berada disamping kapal sehingga tidak terjadi kontak langsung antara penumpang dan kendaraan ketika memasuki kapal.

4. Lapangan Parkir Kendaraan

Menurut hasil analisa yang telah didapat bahwa luas efektif untuk lapangan parkir siap muat di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu adalah sebesar 14.324 m². Berikut ini adalah gambar kondisi rencana lapangan parkir siap muat di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu.

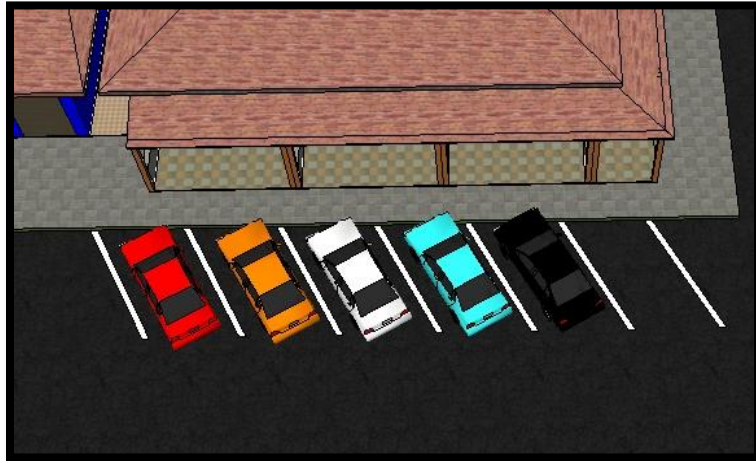


Sumber: Hasil Analisa, 2021

Gambar 5. 4 . Lapangan Parkit siap muat Kondisi Rencana

5. Lapangan Parkir Kendaraan Pengantar/Penjemput

Menurut hasil analisa yang telah didapat bahwa luas efektif untuk lapangan parkir kendaraan pengantar/penjemput di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu sebesar 7.162 m². Berikut ini adalah gambar kondisi rencana lapangan parkir pengantar/penjemput di Pelabuhan Penyeberangan Torobulu.



Sumber: Hasil Analisa, 2021

Gambar 5.5 lapangan parkir siap muat rencana

Table 5.2 Perbandingan Antara Kondisi Pelabuhan Sekarang dan Kondisi Pelabuhan Yang Di Rencanakan

No	Fasilitas	Kondisi Pelabuhan		Keterangan
		Saat Ini	Rencana	
1.	Ruang Tunggu	142,85	562,8 m ²	Pembangunan Ruang tunggu dan penambahan fasilitas yang menunjang kenyamanan penumpang seperti charger box, TV, AC
2.	Jumlah Kursi Ruang Tunggu	Tidak ada	469 kursi	
3.	Lapangan parkir siap muat	690,80 m ²	7.162 m ²	Dibuat terpisah antara lapangan parkir siap muat dengan lapangan parkir pengantar / penjemput
4.	Lapangan parkir pengantar/ penjemput		7.162 m ²	
5.	Jalan Akses Penumpang	<i>Gagway</i> yang belum	<i>Gangway</i> menyambung	Pembangunan fasilitas <i>Gangway</i> yang

	(<i>Gangway</i>)	menyambung ke kapal	dengan dek kapal	menyambung langsung ke dek kapal
--	--------------------	---------------------	------------------	----------------------------------

Sumber hasil analisa 2021

5.6 Usulan pemecahan masalah

Berdasarkan hasil analisa terdapat beberapa fasilitas yang harus di perbaiki pada Pelabuhan Penyebrangan Torobulu. Maka pemecahan masalah yang akan direkomendasikan adalah :

1. Menyiapkan kapasitas ruang tunggu dan jumlah kursi sesuai dengan kebutuhan;
2. Mengoperasikan kembali fasilitas jembatan timbang dan pengadaan operator pada jembatan timbang agar dimensi berat dan muatan kendaraan yang akan masuk ke kapal dapat diketahui sehingga proses pemuatan kendaraan kedalam kapal dapat berjalan cepat, hal ini juga merupakan salah satu cara untuk merawat akses jalan kendaraan serta *movable bridge* dengan cara membatasi beban muatan.
3. Pembangunan jalan akses penumpang (*gangway*) yang menyambung langsung dengan kapal sehingga antara penumpang pejalan kaki dan kendaraan tidak memasuki kapal dengan pintu yang sama yang dapat membahayakan keselamatan .
4. Menyiapkan kebutuhan lapangan parkir siap muat dengan lapangan pengantar penjemput Untuk pengaturan lapangan parkir siap muat dibuat per golongan kendaraan sehingga lebih teratur saat proses pemuatan Melakukan pemisahan lapangan parkir siap muat dengan pengantar penjemput.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pada kondisi eksisting fasilitas daratan pada Pelabuhan Penyebrangan Torobulu berupa ruang tunggu masih belum sesuai dengan keputusan menteri perhubungan no 52 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelabuhan penyebrangan
2. Pada kondisi eksisting pelabuhan penyebrangan Torobulu sudah memiliki jembatan timbang namun belum sesuai penempatannya dengan Peraturan direktorat jendral Perhubungan Darat No SK.242/HK.404/DRJD/2010 Tentang Pedoman Manajemen Lalu Lintas Penyebrangan.
3. Pada kondisi eksisting pelabuhan lapangan parkir siap muat masih terdapat dengan lapangan parkir pengantar/penjemput.

6.2 SARAN

Dari beberapa hal yang telah disimpulkan oleh penulis, maka penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan untuk pengelola pelabuhan dalam hal ini PT ASDP FERRY (persero) cabang bau-bau dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penambahan hingga perbaikan dalam hal ini beberapa fasilitas pokok daratan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pengguna jasa, adapun beberapa saran dan masukan yaitu:

1. Pada fasilitas ruang tunggu harus melakukan penambahan dari luasan ruang tunggu dan banyaknya kursi sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengguna jasa khususnya penumpang mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan memberikan kenyamanan bagi penumpang itu sendiri.
2. Perlu adanya penambahan fasilitas berupa jembatan timbang di pelabuhan Torobulu, hal ini dibutuhkan dikarenakan di pelabuhan Torobulu sendiri telah memiliki fasilitas itu tapi belum bisa di fungsikan dengan baik. Fasilitas ini dibutuhkan dalam operasional pelabuhan sehingga dalam jalannya operasional pelabuhan dapat membuat jembatan MB lebih terawat, karena dengan adanya penimbangan kendaraan dapat dibatasi berapa batas berat muat yang bagi kendaraan yang akan melewati jembatan MB dan Perlu adanya penambahan *gangway* yang belum menyambung di dek kapal sehingga jalan masuk penumpang dan kendaraan bisa dipisahkan sehingga dapat melancarkan operasional penumpang.
3. Fasilitas areal lapangan parkir, perlu dilakukan pemisahan dan penambahan luas antara lapangan parkir siap muat dan lapangan parkir pengantar/penjemput. Dan juga perlu penambahan rambu atau petunjuk yang berupa tulisan “lapangan parkir siap muat” dan “lapangan parkir pengantar/penjemput” sebagai informasi / petunjuk bagi pengguna jasa di pelabuhan Penyeberangan Torobulu.